

Pengaruh Pajak dan Dana Transfer Pusat Terhadap Belanja Modal Di Indonesia Timur

Asiyah

S1 Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Ngerei Surabaya
Email: asiyah.22123@mhs.unesa.ac.id

Lucky Rachmawati

S1 Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Ngerei Surabaya
Email: luckyrachmawati@unesa.ac.id

Abstrak

Kawasan Indonesia Timur memiliki potensi pembangunan yang besar, namun pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan fiskal, terutama karena penerimaan dari Pajak Daerah relatif kecil, sehingga kapasitas membiayai belanja modal sangat bergantung pada transfer fiskal. Studi ini dimaksudkan untuk mengkaji pengaruh Pajak Daerah, Dana Perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Insentif Daerah (DID) terhadap Belanja Modal di 12 provinsi di Indonesia Timur pada periode 2018–2024. Studi ini menerapkan data panel yang diolah dengan STATA 14 dan model yang digunakan adalah Random Effect Model (REM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, Pajak Daerah dan DAU berpengaruh negatif signifikan terhadap Belanja Modal, sementara DBH dan DAK berpengaruh positif signifikan. DID tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Secara simultan, semua variabel memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, mengonfirmasi bahwa kombinasi sumber pendapatan daerah dan transfer fiskal secara keseluruhan menentukan kapasitas belanja modal. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan belanja modal di kawasan ini lebih banyak didorong oleh transfer fiskal daripada pajak daerah, memberikan implikasi penting bagi kebijakan fiskal untuk meningkatkan efektivitas dan kemandirian belanja modal.
Kata Kunci: Belanja Modal, Pajak Daerah, Dana Perimbangan, DID, Indonesia Timur
JEL: H2, H5, H7

Abstract

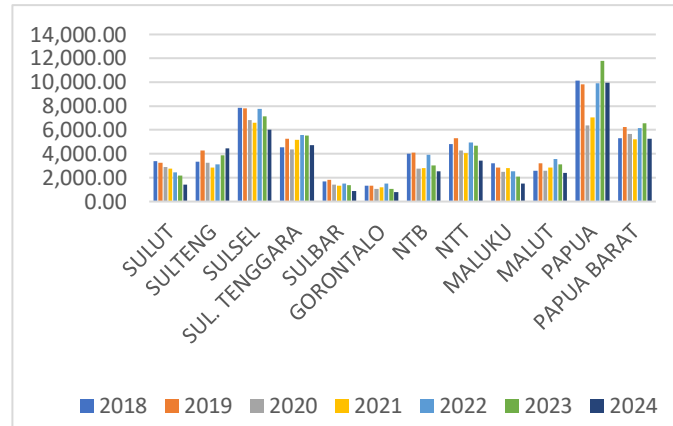
Eastern Indonesia holds significant development potential, but local governments still face fiscal constraints, primarily due to the relatively small revenues from Regional Taxes, which significantly depend on fiscal transfers to finance capital expenditures. This study aims to examine the influence of Regional Taxes, Balancing Funds, which include the General Allocation Fund (DAU), Revenue Sharing Fund (DBH), Special Allocation Fund (DAK), and Regional Incentive Fund (DID), on Capital Expenditures in 12 provinces in Eastern Indonesia for the 2018–2024 period. This study employs panel data processed with STATA 14 and uses the Random Effects Model (REM). The results indicate that, partially, Regional Taxes and DAU have a significant negative effect on Capital Expenditures, while DBH and DAK have a significant positive effect. DID does not show a significant effect. Simultaneously, all variables significantly influence Capital Expenditures, confirming that the combination of regional revenue sources and fiscal transfers determines overall capital expenditure capacity. These findings confirm that the increase in capital expenditures in this region is driven more by fiscal transfers than by regional taxes, providing important implications for fiscal policy to improve the effectiveness and independence of capital expenditures.
Keywords : Capital Expenditure, Local Taxes, Fiscal Transfer, Incentive Fund, Eastern
JEL: H2, H5, H7

PENDAHULUAN

Pembangunan di tingkat wilayah dapat dipahami sebagai rangkaian kegiatan yang terstruktur dan direncanakan secara sistematis untuk mendorong kemajuan pada skala lokal, termasuk peningkatan infrastruktur, pelayanan publik, dan kualitas hidup masyarakat (Badan Pusat Statistika, 2024). Pendekatan ini menekankan pentingnya perencanaan yang menyeluruh agar setiap langkah pembangunan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat di wilayah tersebut. Selain itu, pembangunan daerah memegang peran strategis sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan akses terhadap layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi (Badan Pusat Statistika, 2024). Setiap keberhasilan pembangunan pada level regional akan memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan secara nasional, sehingga efektivitas pembangunan daerah sangat menentukan kemajuan secara lebih luas.

Keberhasilan pembangunan regional juga sangat dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan pemerintah daerah, kapasitas fiskal yang dimiliki, serta kemampuan inovatif dalam memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal (Sentari et al., 2025). Pemerintah daerah dituntut untuk mampu merencanakan, mengalokasikan, dan mengeksekusi program pembangunan secara efisien agar potensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Integrasi strategi pembangunan lokal dengan kebijakan nasional menjadi kunci untuk memastikan pembangunan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan dan mampu mendukung pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah. Dengan pendekatan yang holistik, pembangunan di tingkat daerah menuntut sinergi antara perencanaan strategis, pengelolaan fiskal yang tepat, dan kemampuan inovatif pemerintah daerah. Hal ini memungkinkan setiap potensi lokal dapat dimaksimalkan untuk mendorong kemajuan masyarakat, memperkuat kapasitas wilayah, dan memberikan kontribusi nyata terhadap tujuan pembangunan nasional

Kemandirian fiskal merupakan indikator utama yang menunjukkan kemampuan suatu wilayah untuk mendanai pembangunan dan layanan publik menggunakan sumber pendapatan sendiri (Alwindi & Santoso, 2017). Laporan Badan Pemeriksaan Keuangan menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal antar daerah di Indonesia sangat berbeda, dengan DKI Jakarta memiliki Indeks Kemandirian Fiskal tertinggi, sedangkan Papua Barat terendah (Badan Pemeriksaan Keuangan, 2019). Semakin kuat derajat otonomi fiskal suatu wilayah, semakin luas kemampuan wilayah itu mengalokasikan belanja modal untuk mendukung pembangunan (Nazwa, 2024). Belanja modal merupakan kategori belanja pemerintah yang diarahkan untuk pembangunan infrastruktur serta penambahan aset jangka panjang, sehingga membantu pemerintah daerah meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat. Studi Windoro et al. (2023) mengungkapkan bahwa konsolidasi belanja modal oleh pemerintah daerah berpengaruh besar terhadap masuknya penanaman modal ke Indonesia, yang akhirnya memberikan dorongan positif bagi perekonomian daerah. Berikut gambaran yang lebih jelas mengenai belanja modal di Indonesia Timur, data berikut menunjukkan realisasi belanja modal selama periode penelitian



Gambar 1. Rata - Rata Realisasi Belanja Modal (Dalam Miliar Rupiah)

Sumber : Portal DJPK 2018-2024 (diolah)

Secara umum, perkembangan belanja modal pemerintah daerah di kawasan Indonesia Timur selama periode 2018–2024 menunjukkan kecenderungan meningkat, meskipun dengan pola dan intensitas yang berbeda antarprovinsi. Beberapa wilayah, seperti Papua dan Sulawesi Selatan, tercatat memiliki tingkat belanja modal yang relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. Tingginya belanja modal di kedua provinsi tersebut mencerminkan besarnya kebutuhan pembangunan infrastruktur serta kapasitas fiskal yang lebih memadai, baik yang bersumber dari penerimaan daerah maupun dukungan transfer dari pemerintah pusat. Sebaliknya, provinsi-provinsi seperti Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Maluku Utara menunjukkan tingkat belanja modal yang relatif rendah dan cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pola ini mengindikasikan keterbatasan ruang fiskal daerah yang dipengaruhi oleh rendahnya potensi pendapatan asli daerah serta ketergantungan yang cukup besar terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Ketergantungan tersebut membuat kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga konsistensi alokasi belanja modal menjadi kurang stabil, terutama ketika terjadi perubahan kebijakan transfer atau tekanan fiskal pada tingkat nasional.

Perbedaan pola belanja modal antarprovinsi tersebut mencerminkan masih adanya ketimpangan fiskal di kawasan Indonesia Timur. Ketimpangan ini tidak hanya berkaitan dengan perbedaan kapasitas ekonomi antarwilayah, tetapi juga mencerminkan variasi kebutuhan pembangunan, kondisi geografis, serta kemampuan administratif pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengeksekusi anggaran. Daerah dengan karakteristik wilayah yang lebih menantang dan basis ekonomi yang terbatas cenderung menghadapi hambatan lebih besar dalam meningkatkan belanja modal secara berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, perumusan kebijakan belanja modal perlu dilakukan secara lebih terarah dengan mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat di masing-masing daerah. Alokasi belanja modal yang berbasis kebutuhan aktual diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, memperbaiki kualitas infrastruktur publik, serta mendorong peningkatan kualitas

layanan dasar kepada masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan yang menekankan pentingnya penyesuaian belanja publik dengan karakteristik dan kebutuhan lokal guna mencapai pembangunan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan (Susilo et al., 2024).

Dalam hal pendanaan belanja modal, pemerintah daerah sebaiknya tidak sepenuhnya mengandalkan mekanisme pendanaan pusat ke daerah. Pajak daerah menjadi sumber pendapatan yang dominan yang mencerminkan tingkat kemandirian finansial tingkat lokal serta perannya yang cukup besar terhadap penerimaan daerah (Kuntadi et al., 2022). Pada tahun 2023, pajak daerah menjadi komponen penerimaan daerah yang paling dominan terhadap realisasi pendapatan daerah, dengan persentase mencapai 47,94 persen (Badan Pusat Statistika, 2024). Namun, keterbatasan penerimaan dari pajak daerah membuat pemerintah daerah tidak sepenuhnya mampu menanggung pembiayaan belanja modal, sehingga peran dana dari pemerintah pusat tetap krusial, baik melalui mekanisme transfer fiskal.

Tidak semata-mata bergantung pada pajak daerah, dukungan pendanaan transfer dari pemerintah pusat juga memberikan peranan besar terhadap penguatan kapasitas fiskal daerah. Skema transfer ini terdiri dari beberapa jenis diantaranya yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) yang diformulasikan sebagai instrumen guna menurunkan kesenjangan dalam kapasitas keuangan antardaerah. Dana Alokasi Umum (DAU) juga berperan dalam mendukung pemerintah daerah dalam upaya pengembangan wilayahnya (Susilo et al., 2024). Dana Alokasi Umum berfungsi sebagai mekanisme yang dirancang untuk menyeimbangkan kapasitas keuangan antar daerah, sehingga dapat meminimalkan ketimpangan fiskal dan mendukung keseimbangan penyelenggaraan pemerintahan daerah (Hidayat, 2024). Selain dana perimbangan lainnya, di mana besaran yang diterima mencerminkan tingkat ketergantungan daerah serta dianggarkan untuk mendanai kegiatan dan kebutuhan khusus pemerintah (Putri, 2024). Disamping peran Dana Alokasi Umum (DAU), pemerintahan daerah juga memperoleh Dana Bagi Hasil (DBH) yang mendukung belanja modal.

Pemerintahan daerah juga memperoleh Dana Bagi Hasil (DBH) yang turut menunjang pembiayaan belanja modal. DBH berfungsi sebagai skema penyaluran aliran dana fiskal dari tingkat pusat ke daerah yang diarahkan sebagai upaya penguatan kapasitas anggaran daerah. Dana Bagi Hasil (DBH) berfungsi sebagai skema penyaluran aliran dana fiskal dari pusat ke daerah guna mendukung peningkatan kapasitas anggaran daerah. DBH dialokasikan berdasarkan potensi pendapatan daerah penghasil, sehingga setiap daerah menerima bagian yang proporsional dari sumber daya yang tersedia di wilayahnya (Arina et al., 2019).

Tujuan dari DBH dirancang untuk menurunkan perbedaan fiskal di antara berbagai daerah sekaligus mendukung pelaksanaan desentralisasi. DBH dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan keuangan daerah berdasarkan proporsi yang ditetapkan sesuai potensi daerah penghasil. Dengan demikian, DBH sebagai salah satu mekanisme krusial dalam menjaga keseimbangan fiskal antarwilayah serta memperkuat otonomi daerah. DBH menjadi skema distribusi fiskal dari pemerintah pusat guna mengurangi ketidakseimbangan fiskal vertikal dan memperkuat kapasitas keuangan. Selain (DBH), terdapat sumber transfer lain yang juga sangat penting, yaitu Dana Alokasi

Khusus (DAK). Alokasi Dana ini disalurkan untuk memperkuat pelaksanaan program daerah yang telah ditetapkan sesuai ketentuan.

Selain Dana Bagi Hasil (DBH), terdapat sumber transfer lain yang juga sangat penting, yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK). Pendanaan tersebut diarahkan untuk memperkuat implementasi program daerah yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. DAK diarahkan untuk mendukung berbagai aktivitas investasi daerah, seperti pembangunan dan pengadaan fasilitas, peningkatan kualitas infrastruktur, serta perbaikan aset fisik yang memiliki masa pakai panjang (Muhammad Farhan Muchtar et al., 2023). Alokasi DAK telah ditetapkan berdasarkan kebutuhan daerah yang termasuk dalam prioritas nasional, sehingga pemerintah daerah tidak dapat secara bebas mengalokasikan dana tersebut ke dalam modal belanja. Selain Dana Alokasi Khusus, pemerintah daerah juga menerima Dana Intensif Daerah yang digunakan untuk memperkuat implementasi berbagai program pembangunan serta memperluas kapasitas pemerintah daerah.

Dana insentif daerah diartikan sebagai anggaran nasional yang disalurkan kepada pemerintah daerah yang mampu menunjukkan peningkatan kinerja. Indikator peningkatan tercermin dari cara daerah mengatur keuangannya, mutu layanan yang diberikan kepada masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan layanan. Dana Insentif Daerah (DID) termasuk alokasi anggaran oleh pemerintah pusat yang ditujukan kepada daerah yang mampu menunjukkan performa baik dalam aspek pengelolaan keuangan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pencapaian indikator kesejahteraan masyarakat (Pambudi, 2023). DID mulai diterapkan sejak tahun 2010 sebagai upaya mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah, sekaligus menjadi motivasi bagi daerah untuk mengoptimalkan pelaksanaan program pembangunan (Septiani & Gamayuni, 2023).

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam terkait determinan Sejumlah studi terdahulu menunjukkan temuan yang tidak seragam terkait determinan belanja modal pemerintah daerah. Masaki (2018) menemukan bahwa transfer fiskal mampu memperkuat ruang fiskal daerah sehingga mendorong peningkatan belanja modal. Disisi lain, Mulyati, (2019) melaporkan bahwa DAU, DAK, dan retribusi daerah merupakan variabel yang berkontribusi nyata terhadap belanja modal pada Pemerintah Kota Batam. Sebaliknya, temuan yang berbeda diperoleh oleh Waskito et al. (2019) yang menemukan bahwa Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH) tidak terbukti memberikan pengaruh yang berarti terhadap belanja modal di Provinsi Aceh. Ketidaksesuaiannya temuan tersebut mengindikasikan bahwa kontribusi setiap instrumen transfer fiskal terhadap belanja modal daerah masih beragam antarwilayah.

Berdasarkan perbedaan temuan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis lima sumber pendapatan daerah secara simultan, yaitu Pajak Daerah, DAU, DBH, DAK, dan DID. Pendekatan ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang kontribusi berbagai sumber pendapatan terhadap belanja modal pemerintah daerah. Pendekatan ini juga membedakannya dari penelitian-penelitian terdahulu yang umumnya hanya berfokus pada PAD atau DAK, penelitian ini memasukkan DID sebagai instrumen baru berbasis kinerja untuk menilai sejauh mana dana tersebut efektif dalam mendorong belanja modal produktif. Dengan demikian, Penelitian ini tidak sekadar menganalisis pengaruh antarvariabel,

melainkan juga memberikan gambaran empiris mengenai sumber dana mana yang perlu ditekankan dan dioptimalkan oleh pemerintah daerah.

Kawasan Indonesia Timur dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki ketimpangan fiskal dan terdapat ketergantungan yang cukup besar terhadap aliran dana transfer dari pemerintah pusat. Berdasarkan Buletin APBN (2022), distribusi Produk Domestik Bruto (PDB) nasional masih didominasi oleh wilayah Kawasan Barat Indonesia sebesar 81%, sementara Kawasan Timur hanya menyumbang sekitar 10,9%. Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya kapasitas fiskal dan produktivitas ekonomi di wilayah timur. Meskipun beberapa provinsi seperti Sulawesi Selatan mulai menunjukkan peningkatan PAD, sebagian besar daerah lain seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua masih sangat bergantung pada DAU dan DAK. Oleh karena itu, seluruh provinsi di Kawasan Indonesia Timur dianalisis secara agregat untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai efektivitas desentralisasi fiskal dalam mendorong belanja modal di kawasan dengan tingkat kemandirian fiskal yang berbeda-beda (Marni et al., 2022)

Periode penelitian 2018–2024 dipilih karena mencerminkan kesinambungan kebijakan fiskal daerah, termasuk penerapan Dana Insentif Daerah (DID) berbasis kinerja dan reformulasi kebijakan transfer ke daerah. Rentang waktu ini juga mencakup jangka menengah yang memadai, memungkinkan identifikasi tren, perbedaan, dan dinamika belanja modal antar-daerah, sekaligus tetap relevan dengan kondisi fiskal terkini. Selain itu, pemilihan periode ini menjamin ketersediaan dan konsistensi data sekunder.

Pengelolaan dana publik memiliki peran sentral dalam efektivitas administrasi pemerintah guna merealisasikan sasaran pembangunan. Dengan kompleksitas kebutuhan masyarakat yang meningkat, pengelolaan fiskal perlu melibatkan pemerintah daerah agar kebijakan lebih efektif dan sesuai dengan kondisi lokal (Solicha & Hanifa, 2024). Desentralisasi fiskal adalah mekanisme pelimpahan kewenangan, termasuk tugas dan fungsi pengelolaan keuangan, kepada pemerintah daerah. Proses ini memberikan pemerintah daerah kemampuan untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya fiskal secara mandiri, sehingga mendukung peningkatan kinerja ekonomi di berbagai tingkatan wilayah. Menurut Musgrave (1989), fungsi fiskal terdiri dari alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi berkaitan dengan penyediaan layanan dan fasilitas publik yang lebih efektif jika dikelola oleh pemerintah daerah karena sesuai dengan kebutuhan lokal, sementara fungsi distribusi bertujuan mencapai pemerataan pendapatan dan lebih tepat dilaksanakan pemerintah pusat yang memiliki cakupan wilayah lebih luas. Fungsi stabilisasi fokus pada menjaga kestabilan ekonomi makro, termasuk mengendalikan inflasi, meningkatkan kesempatan kerja, serta memperkuat laju pertumbuhan ekonomi, yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Penelitian ini menggunakan teori desentralisasi fiskal dan *flypaper effect*.

Menurut Oates (1999) dalam Decentralization Theorem menegaskan bahwa penyediaan barang publik akan lebih optimal jika dijalankan oleh otoritas pemerintahan yang memiliki kontak langsung dengan masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, desentralisasi fiskal direalisasikan melalui instrumen penerimaan daerah, seperti pajak daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH),

Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Insentif Daerah (DID). Kapasitas fiskal pemerintah daerah merujuk pada kemampuan untuk mengatur dan mengembangkan seluruh sumber pendapatan yang ada secara optimal. Fiscal capacity theory, menurut Advisory Commission on Intergovernmental Relations (Choi, 2021), menekankan bahwa sumber daya fiskal yang dapat dikumpulkan oleh pemerintah daerah menjadi dasar penyediaan layanan publik.

Fenomena *flypaper effect* pertama kali dijelaskan dengan istilah “*money sticks where it hits*”, yang menunjukkan bahwa dana transfer dari pusat cenderung memiliki efek lebih besar pada belanja daerah dibandingkan pendapatan dari pajak lokal. Hines & Thaler (1995) memperkuat konsep ini dengan menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah lebih didominasi oleh alokasi dana dari pusat daripada kontribusi pajak lokal. Dalam penelitian ini, pajak daerah digunakan sebagai proksi pendapatan lokal, sedangkan DAU, DBH, DAK, dan DID direpresentasikan sebagai transfer pusat. Belanja modal dipilih sebagai variabel dependen karena mencerminkan pengeluaran produktif yang langsung meningkatkan infrastruktur dan kualitas layanan publik. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah, DAU, DBH, DAK, dan DID terhadap belanja modal di Kawasan Indonesia Timur tahun 2018–2024, serta menguji apakah hubungan tersebut mencerminkan desentralisasi fiskal dan fenomena *flypaper effect*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif melalui metode regresi data panel guna mengkaji pengaruh pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Insentif Daerah (DID) terhadap belanja modal pemerintah di Kawasan Indonesia Timur rentang waktu periode 2018–2024. Data yang dijadikan sebagai bahan analisis bersifat sekunder, diperoleh dari publikasi resmi pemerintah seperti APBD, Buletin APBN, dan laporan keuangan daerah. Regresi data panel dipilih karena mampu mengakomodasi informasi yang lebih komprehensif dibandingkan analisis *time series* atau *cross-section* tunggal, yang berdampak pada peningkatan efisiensi dan derajat kebebasan estimasi, mengurangi multikolinearitas antarvariabel, serta mengakomodasi perbedaan yang tidak teramati antarunit dan waktu (Gujarati & Porter, 2009). Model regresi dioperasionalkan melalui persamaan logaritma natural sebagai berikut :

$$lbm_{it} = \alpha + \beta_1 lpd_{it} + \beta_2 ldau_{it} + \beta_3 ldbh_{it} + \beta_4 ldak_{it} + \beta_5 ldid_{it} + e_{it} \quad (1)$$

Penjelasan :

lbm= Belanja modal

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ = Koefisien variabel independen

lpd = Pajak daerah

ldau = Dana alokasi umum

ldbh = Dana bagi hasil

ldak = Dana Alokasi Khusus

Idid = Dana intensif daerah

e = Error

i = Jumlah pemerintahan daerah di kawasan indoensia timur

t = periode data penelitian, 2018- 2024

Penentuan Model Estimasi

Untuk menentukan model data panel yang tepat, penelitian ini menggunakan uji Chow, LM, dan Hausman. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan asumsi klasik agar model regresi data panel memenuhi standar statistik dan dapat diandalkan.

Uji Chow

Menurut Gujarati & Porter (2009), Pengujian Chow bertujuan untuk menentukan apakah Pooled OLS lebih baik dibandingkan Fixed Effects Model (FEM). Jika nilai p-value melebihi 0,05, perbedaan antarmodel dianggap tidak signifikan, sehingga Pooled OLS dipilih sebagai model yang sesuai. Sebaliknya, ketika p-value kurang dari atau sama dengan 0,05, terdapat indikasi perbedaan yang signifikan antarmodel sehingga FEM lebih tepat digunakan.

Uji Hausman

Menurut Gujarati & Porter (2009), Uji Hausman diaplikasikan untuk menentukan model yang lebih sesuai antara Fixed Effects (FEM) dan Random Effects (REM). Apabila nilai p-value lebih besar dari 0,05, Random Effects (REM) dipilih karena tidak terdapat korelasi antara efek individual dengan variabel independen. Sebaliknya, jika p-value sama dengan atau lebih kecil dari 0,05, model Fixed Effects (FEM) dianggap lebih sesuai.

Uji Lagrange Multiplier

Menurut Gujarati & Porter, (2009), Uji LM diterapkan untuk menilai apakah Random Effects (REM) lebih sesuai dibandingkan Pooled OLS, Apabila nilai p-value melebihi 0,05, efek individual dianggap tidak signifikan sehingga model Pooled OLS lebih tepat digunakan. Sebaliknya, jika p-value sama dengan atau lebih kecil dari 0,05, terdapat indikasi keberadaan efek individual, sehingga Random Effects (REM) menjadi pilihan yang lebih sesuai.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas dilakukan untuk mendeteksi tingkat keterkaitan antarvariabel bebas. Gujarati & Porter (2009) menyebutkan bahwa multikolinieritas yang tinggi akan memicu estimasi koefisien menjadi kurang efisien. Untuk mengukur hal tersebut, digunakan Variance Inflation Factor (VIF) sebagai indikator. Apabila nilai VIF kurang dari 10, maka tidak terdapat multikolinieritas; sebaliknya, jika VIF sama dengan atau melebihi 10, multikolinieritas dianggap terjadi.

Uji Heterokedastisita

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk menilai konsistensi varians residual di antara seluruh observasi. Nilai p-value di atas 0,05 menunjukkan bahwa varians

residual relatif seragam, sedangkan p-value kurang dari atau sama dengan 0,05 menandakan adanya perbedaan varians residual, yang mengindikasikan heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

Pengujian normalitas ditujukan untuk menilai apakah residual dalam regresi terdistribusi secara normal. Model regresi dikatakan layak apabila residualnya terdistribusi secara normal. Jika nilai probabilitas melebihi 0,05, residual dianggap berdistribusi normal, sedangkan p-value yang kurang dari atau sama dengan 0,05 menunjukkan bahwa residual tidak mengikuti distribusi normal.

Pengujian Hipotesis

Uji T (Parsial)

Pengujian parsial diperuntukkan untuk mengidentifikasi efek masing-masing variabel bebas secara terpisah terhadap variabel terikat. Pengujian dilaksanakan pada tingkat signifikansi 0,05, di lihat dari nilai probabilitas < 0,05 mengindikasikan efek pengaruh yang signifikan

Uji F (Simultan)

Uji F diterapkan untuk mengidentifikasi efek kolektif dari semua variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis dilakukan pada tingkat signifikansi 5%, dan apabila p-value berada di bawah 0,05, hal ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen secara bersamaan bersifat signifikan.

Koefisien Determinasi

Mmeiliki fungsi untuk mengukur sejauh mana variabel-variabel bebas dapat menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel terikat dalam model regresi. Apabila nilai R² tinggi, hal ini menunjukkan bahwa model cukup efektif dalam memprediksi variabel dependen, sementara nilai rendah mengindikasikan sebagian besar variasi dipengaruhi faktor eksternal di luar model

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Pemilihan Model

Untuk menentukan model data panel yang tepat, penelitian ini menggunakan uji Chow, Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier.

Tabel 1. Hasil Pemilihan Model

Uji Model Terbaik	Probabilitas	Keputusan
Uji Chow	0.0000	Fixed Effect Model
Uji Hausman	0.2462	Random Effect Model
Uji LM	0.0000	Random Effect Model

Sumber : Diolah Penulis (Stata 14), 2025

Pemilihan model regresi data panel dilakukan melalui Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier (LM). Hasil Uji Chow menunjukkan nilai probabilitas

sebesar $0,0000 < 0,05$, sehingga Fixed Effect Model lebih tepat dibandingkan Common Effect Model. Selanjutnya, Uji Hausman menghasilkan nilai probabilitas sebesar $0,2462 > 0,05$, sehingga Random Effect Model (REM) lebih tepat dibandingkan Fixed Effect Model karena efek individual tidak berkorelasi dengan variabel independen, Uji Hausman menunjukkan bahwa REM merupakan model yang paling tepat. Oleh karena itu, pengujian selanjutnya dilakukan menggunakan Uji Lagrange Multiplier guna membandingkan Random Effect Model dengan Common Effect Model. Hasil Uji LM mengindikasikan nilai probabilitas sebesar $0,0000 < 0,05$, sehingga Random Effect Model lebih tepat digunakan. Dengan demikian, model terbaik dalam penelitian ini adalah Random Effect Model.

Uji Asumsi Klasik

Menurut Gujarati (2009), Asumsi klasik diuji melalui normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Perlu dicatat bahwa uji autokorelasi umumnya relevan untuk data deret waktu, sementara data panel dengan dimensi waktu yang relatif pendek pengaruhnya cenderung kecil (Basuki dan Prawoto, 2016). Oleh karena itu, penelitian ini membatasi pengujian asumsi klasik pada uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Selanjutnya, uji multikolinearitas dilakukan untuk memastikan tidak adanya hubungan linear Multikolinearitas diuji guna memastikan variabel independen tidak saling berkorelasi secara kuat dalam model. Secara rinci, hasil uji multikolinearitas yang disajikan pada Tabel 4 (Lampiran 1). Multikolinearitas diuji memanfaatkan nilai Variance Inflation Factor (VIF), dengan batas kelayakan di bawah 10. Hasil perhitungan menunjukkan VIF berada pada kisaran 1,22–3,79 dengan rata-rata 2,84, dari hasil ini terlihat tidak terdapat indikasi multikolinearitas yang mengganggu pada spesifikasi regresi yang digunakan.

Tahap pengujian selanjutnya ialah uji heteroskedastisitas yang bertujuan untuk mengevaluasi apakah varians residual dalam model regresi bersifat konstan pada seluruh observasi atau justru mengalami perbedaan. Konsistensi varians residual merupakan salah satu asumsi penting dalam model regresi klasik, karena pelanggaran terhadap asumsi ini dapat memengaruhi ketepatan estimasi koefisien dan keandalan inferensi statistik yang dihasilkan. Dalam pengujian ini, interpretasi didasarkan pada nilai probabilitas (p-value) yang diperoleh dari hasil uji statistik. Secara umum, apabila nilai p-value berada di atas tingkat signifikansi 5 persen (0,05), maka tidak terdapat cukup bukti statistik untuk menyatakan adanya perbedaan varians residual antar observasi. Situasi tersebut mengindikasikan bahwa residual memiliki penyebaran yang relatif seragam, sehingga asumsi homoskedastisitas dapat dianggap terpenuhi. Sebaliknya, nilai p-value yang kurang dari atau sama dengan 0,05 menunjukkan adanya variasi residual yang tidak konstan, yang menandakan terjadinya heteroskedastisitas dan berpotensi menurunkan kualitas estimasi model regresi.

Dalam penelitian ini, pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan Breusch–Pagan/Cook–Weisberg test, yang merupakan salah satu metode yang umum digunakan untuk mendeteksi adanya pola sistematis pada varians residual. Hasil pengujian tersebut disajikan secara rinci pada Tabel 5 di Lampiran 2. Berdasarkan output yang diperoleh, nilai Prob > χ^2 tercatat sebesar 0,4637, yang secara jelas berada di atas batas signifikansi 0,05. Nilai probabilitas tersebut menunjukkan bahwa

hipotesis nol yang menyatakan tidak adanya heteroskedastisitas tidak dapat ditolak. Dengan demikian, tidak ditemukan indikasi adanya perubahan varians residual yang bersifat sistematis seiring dengan perubahan variabel independen dalam model. Temuan ini mengimplikasikan bahwa model regresi yang digunakan telah memenuhi asumsi homoskedastisitas, sehingga estimasi parameter yang dihasilkan dapat dianggap efisien dan uji statistik yang menyertainya dapat diinterpretasikan secara lebih andal.

Tahap selanjutnya dalam pengujian asumsi klasik adalah uji normalitas yang bertujuan untuk menilai kesesuaian distribusi residual terhadap distribusi normal. Pemenuhan asumsi ini menjadi penting karena berkaitan dengan keakuratan hasil estimasi dan validitas pengujian statistik dalam model regresi. Dalam penelitian ini, normalitas residual diuji menggunakan metode Shapiro–Wilk, yang secara luas digunakan untuk mendeteksi penyimpangan distribusi data. Hasil pengujian menunjukkan nilai Prob > z sebesar 0,12324, yang berada di atas tingkat signifikansi 5 persen. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa tidak terdapat bukti statistik yang cukup untuk menolak hipotesis nol, sehingga residual dapat dianggap mengikuti distribusi normal. Hasil output normalitas disajikan pada Tabel 5 di Lampiran 2.

Temuan ini menunjukkan bahwa sebaran residual tidak mengalami penyimpangan distribusi yang berarti, baik dari sisi kemencengan maupun tingkat keruncingan. Dengan terpenuhinya asumsi normalitas, model regresi yang digunakan dinilai memiliki kualitas estimasi yang memadai dan dapat diandalkan dalam proses analisis lebih lanjut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas residual, sehingga hasil estimasi dan pengujian hipotesis yang dilakukan dapat digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan. Hasil output normalitas disajikan pada Tabel 6 di Lampiran 3.

Model Regresi

Tabel 2. Hasil Regresi

l bm	Coef	Std.Err.	z	p>(z)
l pd	-0.2511705	0.0758506	-3.31	0.001
l dau	-0.5979767	0.2886144	-2.07	0.038
l dbh	0.1251556	0.0397567	3.15	0.002
l dak	1.01133	0.114167	8.68	0.000
l did	-0.01409	0.0275854	-0.51	0.610
_cons	3.212.931	1.432.653	2.24	0.025

Sumber : Diolah Penulis (Stata 14), 2025

Setelah didapatkan hasil regresi data panel pada olah data diatas, berikut model sederhana regresi Random Effect yang didapatkan pada penelitian kali ini :

$$l**bm**_{it} = 3.212931_{it} - 0.2511705l**pd**_{it} - 0.5979767l**dau**_{it} + 0.1251556l**dbh**_{it} + 1.01133l**dak**_{it} - 0.01409l**did**_{it} + e_{it} \tag{2}$$

Merujuk pada estimasi model regresi Random Effect, interpretasi hasil dapat ditampilkan sebagai berikut

- a. Nilai konstanta sebesar 3.2129% menunjukkan besarnya nilai dasar belanja modal ketika seluruh variabel independen bernilai nol
- b. Setiap kenaikan 1% Pajak Daerah berkaitan dengan penurunan belanja modal sebesar 0.2512%, dengan variabel lain diasumsikan tidak berubah.
- c. Setiap kenaikan 1% DAU diikuti dengan penurunan belanja modal sebesar 0.5980%, dengan asumsi variabel lain dalam kondisi konstan.
- d. Setiap kenaikan 1% DBH diikuti dengan kenaikan belanja modal sebesar 0.1252%, dengan asumsi variabel lain tidak ada perubahan.
- e. Setiap kenaikan 1% DAK diikuti dengan kenaikan belanja modal sebesar 1.0113%, dengan diasumsikan variabel lainnya dalam kondisi konstan. Angka ini tercatat yang terbesar di antara semua variabel, sehingga mengindikasikan bahwa perubahan pada DAK memberikan kontribusi paling signifikan terhadap variasi belanja modal daerah.
- f. Setiap kenaikan 1% DID diikuti dengan penurunan belanja modal sebesar 0.0141%, dengan asumsi variabel lain tidak ada perubahan.

Uji T (Parsial)

Tabel 3. Hasil Uji T

l bm	Coef	Std.Err.	z	p>(z)	Keterangan
l pd	-0.2511705	0.0758506	-3.31	0.001	Negatif Signifikan
l dau	-0.5979767	0.2886144	-2.07	0.038	Negatif Signifikan
l dbh	0.1251556	0.0397567	3.15	0.002	Positif Signifikan
l dak	101.133	0.114167	8.68	0.000	Positif Signifikan
l did	-0.01409	0.0275854	-0.51	0.610	Negatif Tidak Signifikan

Sumber : Diolah Penulis (Stata 14), 2025

Output pengujian memperlihatkan bahwa Pajak daerah dan DAU secara statistik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal, sedangkan DBH dan DAK berperan positif dan signifikan. Dana Insentif Daerah (DID) tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan dalam model ini.

Uji F (Simultan)

Berdasarkan hasil pengujian simultan, seluruh variabel fiskal yang dianalisis terbukti secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pemerintah daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa pajak daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Insentif Daerah (DID) secara simultan memengaruhi dinamika belanja modal.

Hasil tersebut mengindikasikan bahwa perubahan belanja modal tidak ditentukan oleh satu sumber pendanaan secara terpisah, melainkan merupakan hasil keterkaitan antara pendapatan asli daerah dan transfer fiskal dari pemerintah pusat. Sinergi berbagai sumber penerimaan ini memperluas ruang fiskal pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan, khususnya pada sektor infrastruktur dan pelayanan publik. Rincian hasil uji simultan disajikan pada Tabel 7 di Lampiran 4.

Koefisien Determinasi (R^2)

Mengacu hasil estimasi, diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2 overall) sebesar 0,8909. Nilai tersebut menunjukkan bahwa model yang digunakan memiliki kemampuan penjelasan yang tinggi, di mana variabel independen yang meliputi Pajak Daerah, DAU, DBH, DAK, serta DID secara bersama-sama mampu menjelaskan 89,09 persen variasi Belanja Modal pemerintah daerah di kawasan Indonesia Timur. Sementara itu, sisa variasi Belanja Modal sebesar 10,91 persen dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang dimasukkan dalam model penelitian ini. Faktor-faktor tersebut dapat mencakup kondisi sosial ekonomi, karakteristik wilayah, kebijakan sektoral, maupun variabel institusional lainnya yang tidak dianalisis secara eksplisit. Hasil lengkap koefisien determinasi disajikan pada Tabel 8 di Lampiran 5.

Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Belanja Modal

Temuan analisis mengungkapkan bahwa pajak daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal di kawasan Indonesia Timur. Temuan ini mengungkapkan bahwa kenaikan peningkatan penerimaan pajak daerah belum secara optimal dialokasikan untuk pembangunan dan investasi publik, melainkan lebih banyak digunakan untuk belanja rutin dan belanja wajib. Kondisi tersebut selaras dengan Sugiyarto et al. (2025) yang menyebutkan bahwa daerah-daerah di kawasan timur masih menghadapi keterbatasan kapasitas fiskal dan basis pajak yang sempit, serta dominasi belanja pegawai dan administrasi dalam struktur belanja publik. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Sacchi & Salotti (2017) yang menyebutkan peningkatan penerimaan pajak daerah dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih berhati-hati dalam pengeluaran, sehingga cenderung menekan alokasi belanja yang bersifat jangka panjang seperti belanja modal. Secara deskriptif, provinsi dengan penerimaan pajak daerah relatif tinggi tidak selalu menunjukkan alokasi belanja modal yang lebih besar, sementara daerah dengan pajak daerah rendah tetap mengalokasikan belanja modal dalam jumlah terbatas. Pola ini memperkuat hasil regresi bahwa pajak daerah belum berperan sebagai pendorong utama belanja modal selama periode 2018–2024.

Temuan empiris tersebut mencerminkan bahwa karakter DAU yang tidak memiliki pengikatan tujuan penggunaan (unconditional transfer) berpotensi mengurangi dorongan bagi pemerintah daerah untuk memprioritaskan belanja yang bersifat produktif. Temuan ini sejalan dengan pandangan yang menyatakan bahwa dana transfer umum cenderung menggeser fokus anggaran daerah ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek, dibandingkan pada pengeluaran pembangunan jangka panjang. Selain itu, transfer antar pemerintah yang tidak disertai pengaturan penggunaan yang ketat dapat melemahkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah serta menurunkan efisiensi alokasi anggaran. Sebagaimana hal tersebut, meskipun DAU berperan penting dalam menjaga kesinambungan fiskal daerah, perannya sebagai pendorong belanja modal di Kawasan Indonesia Timur masih belum optimal. Untuk meningkatkan kontribusi DAU terhadap pembangunan infrastruktur, diperlukan pengelolaan anggaran yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada investasi jangka panjang, sehingga fleksibilitas yang dimiliki DAU dapat dimanfaatkan secara lebih produktif dalam mendukung tujuan pembangunan daerah. Temuan ini tidak sejalan dengan teori desentralisasi fiskal, karena peningkatan pajak

daerah tidak diikuti kenaikan belanja pembangunan. Sebaliknya, hasil ini mengindikasikan adanya fenomena *flypaper effect*, di mana daerah lebih bergantung pada dana transfer dibandingkan pendapatan pajak

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Temuan analisis ini memperlihatkan DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal di kawasan Indonesia Timur. Kondisi ini tidak terlepas dari sifat DAU sebagai dana bersifat umum yang memberikan keleluasaan tinggi bagi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas penggunaannya. Fleksibilitas tersebut pada satu sisi membantu daerah memenuhi kewajiban pengeluaran rutin, namun pada sisi lain mendorong dominasi belanja operasional dan belanja pegawai yang bersifat wajib, sehingga porsi anggaran yang dapat dialokasikan untuk belanja modal menjadi terbatas. Dalam periode 2018–2024, daerah dengan alokasi DAU yang relatif besar dan stabil, seperti Papua dan Sulawesi Selatan, tidak memperlihatkan kecenderungan peningkatan belanja modal yang sejalan dengan besarnya dana yang diterima. Sementara itu, di Maluku dan Papua Barat, peningkatan DAU lebih banyak diikuti oleh kondisi belanja modal yang cenderung tidak berkembang secara signifikan. Pola ini menunjukkan bahwa tambahan dana dari DAU tidak secara otomatis diterjemahkan menjadi peningkatan investasi publik, khususnya pada pembangunan infrastruktur dan pengadaan aset tetap.

Temuan ini sejalan dengan Lutpikah & Mahendra (2020) serta (Fikri, 2023) menemukan bahwa DAU menekan proporsi belanja modal, dan didukung oleh Ribeiro et al. (2020) yang menunjukkan bahwa transfer antarpemerintah dapat menurunkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, DAU di kawasan Indonesia Timur belum berfungsi optimal sebagai pendorong belanja modal daerah. Hasil ini mengindikasikan adanya fenomena *flypaper effect*, di mana dana transfer lebih dominan memengaruhi belanja daerah, sehingga belum mencerminkan prinsip teori desentralisasi fiskal yang mendorong kemandirian dan peningkatan belanja produktif

Kondisi tersebut mencerminkan bahwa karakter DAU yang tidak memiliki pengikatan tujuan penggunaan (unconditional transfer) berpotensi mengurangi dorongan bagi pemerintah daerah untuk memprioritaskan belanja yang bersifat produktif. Temuan ini sejalan dengan pandangan yang menyatakan bahwa dana transfer umum cenderung menggeser fokus anggaran daerah ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek, dibandingkan pada pengeluaran pembangunan jangka panjang. Selain itu, transfer antar pemerintah yang tidak disertai pengaturan penggunaan yang ketat dapat melemahkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah serta menurunkan efisiensi alokasi anggaran. Dengan demikian, meskipun DAU berperan penting dalam menjaga kesinambungan fiskal daerah, perannya sebagai pendorong belanja modal di Kawasan Indonesia Timur masih belum optimal. Untuk meningkatkan kontribusi DAU terhadap pembangunan infrastruktur, diperlukan pengelolaan anggaran yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada investasi jangka panjang, sehingga fleksibilitas yang dimiliki DAU dapat dimanfaatkan secara lebih produktif dalam mendukung tujuan pembangunan daerah

Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal

DBH memperlihatkan keterkaitan yang positif terhadap belanja modal pemerintah daerah di kawasan Indonesia Timur. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan alokasi DBH memberikan peluang tambahan bagi pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran produktif, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur dan investasi publik yang berdampak langsung pada kualitas layanan masyarakat. DBH berfungsi sebagai instrumen kompensasi fiskal bagi daerah penghasil sumber daya alam, sehingga memungkinkan pemerintah daerah memiliki ruang fiskal tambahan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program pembangunan yang prioritas.

Sejalan dengan temuan Shinta et al, (2021), DBH berfungsi sebagai instrumen kompensasi fiskal bagi daerah penghasil sumber daya alam yang memberikan ruang fiskal tambahan bagi pemerintah daerah untuk membiayai belanja produktif. Namun demikian, hasil ini berbeda dengan penelitian Nugraha & Dwirandra (2016) yang menemukan bahwa DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Perbedaan ini diduga disebabkan oleh perbedaan komposisi pendapatan daerah, di mana pada kawasan Indonesia Timur porsi DBH dalam struktur pendapatan daerah relatif lebih besar. Hasil ini juga mencerminkan teori desentralisasi fiskal, di mana transfer dari pusat dapat memperkuat kemampuan daerah dalam meningkatkan belanja produktif.

Secara deskriptif, dalam rentang waktu 2018–2024, provinsi-provinsi dengan penerimaan DBH yang relatif besar, seperti Papua dan Papua Barat, memperlihatkan kecenderungan untuk meningkatkan alokasi belanja modal. Pola serupa juga terlihat di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Maluku, di mana peningkatan DBH diikuti dengan penguatan belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa DBH tidak hanya berfungsi sebagai transfer fiskal untuk mendukung keseimbangan keuangan antar daerah, tetapi juga memiliki peran strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah untuk melaksanakan pengeluaran produktif dan proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang krusial bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Lebih lanjut, pemanfaatan DBH sebagai sumber pendanaan belanja modal menekankan pentingnya mekanisme transfer fiskal yang tepat sasaran. Dana ini memungkinkan pemerintah daerah untuk merencanakan pengeluaran dengan lebih fleksibel dan strategis, menyesuaikan alokasi anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan, sekaligus memastikan bahwa investasi publik dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Dengan demikian, DBH dapat dianggap sebagai salah satu instrumen transfer fiskal yang efektif dalam mendorong alokasi belanja modal secara berkelanjutan, memperkuat pembangunan infrastruktur, dan mendukung pemerataan pembangunan di kawasan Indonesia Timur.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Analisis mengungkapkan bahwa DAK keterkaitan yang kuat dengan peningkatan belanja modal pemerintah daerah di Kawasan Indonesia Timur. Hubungan ini mengindikasikan bahwa alokasi DAK dimanfaatkan sebagai instrumen pendukung pembangunan fisik, terutama dalam penyediaan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan publik. Karakter DAK sebagai dana yang bersifat spesifik dan ditujukan pada sektor-sektor prioritas nasional menjadikan penggunaannya lebih

terarah, sehingga mendorong pengeluaran daerah pada pembiayaan aset tetap dan kegiatan pembangunan jangka panjang. Dalam rentang waktu 2018–2024, beberapa provinsi di kawasan Indonesia Timur, seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat, memperlihatkan kecenderungan peningkatan belanja modal yang berjalan seiring dengan besaran alokasi DAK yang diterima. Pola ini mencerminkan bahwa DAK berperan penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah, khususnya dalam mendukung pembiayaan infrastruktur yang sulit dibiayai hanya melalui pendapatan asli daerah. Lebih lanjut, pemanfaatan DAK mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyelaraskan kebijakan pengeluaran dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan secara nasional. Melalui DAK, pengalokasian anggaran dapat difokuskan pada proyek-proyek prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan layanan publik dan pemerataan pembangunan. Dengan demikian, DAK tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendanaan tambahan, tetapi juga sebagai instrumen fiskal strategis yang mendorong investasi publik serta mempercepat pembangunan wilayah di Kawasan Indonesia Timur.

Sejalan dengan Novriansa & Subeki (2020) serta (Meutia et al., 2022), hubungan positif tersebut mencerminkan karakteristik DAK sebagai *earmarked grant* yang secara spesifik diarahkan untuk membiayai kegiatan fisik dan sektor prioritas nasional, sehingga lebih mudah diterjemahkan ke dalam belanja modal. Hasil ini mencerminkan prinsip teori desentralisasi fiskal, di mana transfer dari pusat mampu mendukung peningkatan belanja pembangunan daerah.

Pengaruh Dana Intensif Daerah Terhadap Belanja Modal

Dana Insentif Daerah (DID) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Dana Insentif Daerah (DID) terbukti tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal pemerintah daerah di Kawasan Indonesia Timur. Temuan ini mengindikasikan bahwa alokasi DID selama periode 2018–2024 belum mampu secara langsung mendorong peningkatan belanja modal di masing-masing provinsi. Perbedaan alokasi DID antarprovinsi tidak selalu diikuti oleh perubahan belanja modal yang searah, sehingga pengeluaran daerah terkait pembangunan fisik tidak bergantung pada besaran DID yang diterima. Hal ini menegaskan bahwa peran DID lebih dominan sebagai instrumen untuk mendorong kinerja, efisiensi, transparansi, dan perbaikan tata kelola keuangan daerah, daripada sebagai sumber pembiayaan utama untuk proyek infrastruktur atau aset tetap. Selain itu, fokus DID yang diarahkan pada indikator kinerja dan pencapaian target administratif membuat kontribusinya terhadap belanja modal bersifat tidak langsung. Dengan kata lain, meskipun DID dapat meningkatkan kualitas manajemen keuangan dan mendorong pemerintah daerah untuk memenuhi standar kinerja tertentu, efeknya terhadap pembiayaan pembangunan fisik atau infrastruktur masih terbatas. Temuan ini sejalan dengan penelitian Normalita dan Mahmud (2017), yang menyatakan bahwa DID tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal karena skala dan tujuan dana tersebut tidak diarahkan secara spesifik untuk mendukung investasi fisik. Oleh karena itu, meskipun DID tetap menjadi bagian penting dari mekanisme insentif fiskal, efektivitasnya dalam meningkatkan belanja modal di Kawasan Indonesia Timur masih perlu diperkuat melalui integrasi dengan sumber pendanaan lain, perencanaan anggaran yang lebih strategis, serta penyesuaian kebijakan agar dana insentif ini dapat

lebih mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan publik secara nyata.

Dalam perspektif teori desentralisasi fiskal, transfer dari pemerintah pusat seharusnya meningkatkan kapasitas fiskal daerah untuk membiayai belanja produktif seperti belanja modal. Namun, tidak signifikannya DID menunjukkan bahwa dana tersebut belum dioptimalkan untuk tujuan pembangunan dan cenderung dialokasikan pada pengeluaran non-investasi. Selain itu, hasil ini tidak sejalan dengan konsep *flypaper effect*, di mana dana transfer umumnya lebih mendorong peningkatan belanja daerah. Tidak ditemukannya pengaruh signifikan DID mengindikasikan bahwa fenomena tersebut tidak terjadi, yang diduga karena karakteristik DID yang berbasis kinerja dan fleksibel sehingga tidak secara khusus diarahkan pada belanja modal.

Pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Intensif Daerah Terhadap Belanja Modal.

Pajak daerah, DAU, DBH, DAK, serta DID secara simultan terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap besaran belanja modal pemerintah daerah di kawasan Indonesia Timur. Hasil ini menegaskan bahwa dinamika belanja modal tidak dapat dijelaskan hanya dengan mengandalkan satu jenis sumber pembiayaan, melainkan merupakan konsekuensi dari keterkaitan yang saling melengkapi antara kapasitas fiskal daerah, kinerja pengelolaan pendapatan asli daerah, serta skema transfer fiskal yang dirancang dan disalurkan oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, belanja modal mencerminkan hasil akhir dari proses pengambilan keputusan fiskal yang kompleks dan multidimensi. Keberadaan berbagai instrumen pendapatan dan transfer tersebut membentuk struktur keuangan daerah yang menentukan ruang gerak fiskal pemerintah daerah dalam menyusun prioritas belanja. Pajak daerah merepresentasikan tingkat kemandirian fiskal dan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal, sementara DAU, DBH, DAK, dan DID berperan sebagai instrumen penyeimbang sekaligus penguat kapasitas keuangan daerah. Kombinasi sumber-sumber pendanaan ini secara langsung memengaruhi pola pengalokasian anggaran, khususnya dalam pembiayaan belanja modal yang mencakup pembangunan dan pengadaan aset tetap, penyediaan infrastruktur publik, serta peningkatan kualitas layanan dasar bagi masyarakat.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Ida Noviati et al.(2025) yang menemukan adanya pengaruh signifikan dana fiskal daerah terhadap belanja sektor publik serta indikasi teori *flypaper effect*. Dalam praktik pengelolaan keuangan daerah, peningkatan belanja modal tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya penerimaan yang diperoleh, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan berbagai sumber pendanaan tersebut secara efektif dan efisien. Sinergi yang baik antara pendapatan asli daerah dan transfer dari pemerintah pusat menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa setiap dana yang diterima dapat dialokasikan sesuai dengan kebutuhan riil dan prioritas pembangunan daerah (Fitrianti et al., 2025). Tanpa perencanaan yang matang dan koordinasi fiskal yang baik, peningkatan penerimaan belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas belanja modal. Lebih lanjut, interaksi antara pajak daerah dan transfer pusat memberikan fleksibilitas fiskal yang memungkinkan pemerintah daerah menyesuaikan kebijakan belanja dengan

karakteristik dan tantangan spesifik wilayahnya (Hidayat, 2024). Fleksibilitas ini penting bagi daerah di kawasan Indonesia Timur yang memiliki kondisi geografis, tingkat pembangunan, serta kebutuhan infrastruktur yang beragam. Dengan dukungan transfer fiskal yang memadai dan pengelolaan pendapatan daerah yang optimal, pemerintah daerah memiliki peluang lebih besar untuk mendorong investasi infrastruktur yang bersifat strategis dan berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, pola belanja modal yang terbentuk mencerminkan keseimbangan antara upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah dan tingkat ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat. Keseimbangan ini secara simultan memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pengaruh simultan pajak daerah, DAU, DBH, DAK, dan DID terhadap belanja modal menegaskan pentingnya pendekatan kebijakan fiskal yang terintegrasi guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Analisis Teori Desentralisasi Fiskal Dan *Flypaper Effect*

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini dapat dijelaskan melalui perspektif teori desentralisasi fiskal, yang menekankan bahwa peningkatan kapasitas penerimaan daerah, baik yang bersumber dari pajak lokal maupun transfer pemerintah pusat, seharusnya memperkuat kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan secara efektif. Secara ideal, kombinasi antara PAD dan dana transfer pusat memungkinkan pemerintah daerah untuk menyeimbangkan antara belanja rutin, pelayanan publik, dan investasi jangka panjang yang produktif (Ramadhan & Rahardjo, 2024). Namun, kondisi empiris di Kawasan Indonesia Timur menunjukkan bahwa pajak daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU) justru memiliki pengaruh negatif terhadap belanja modal. Hal ini menandakan bahwa meskipun pendapatan daerah meningkat, sebagian besar alokasi dana lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja rutin, termasuk gaji pegawai, tunjangan, dan operasional pemerintahan, sehingga kapasitas untuk menambah belanja modal yang mendukung pembangunan fisik dan investasi publik menjadi terbatas. Keadaan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi fiskal di wilayah ini belum sepenuhnya optimal, karena sebagian besar penerimaan daerah belum diarahkan secara signifikan pada kegiatan yang memberikan nilai tambah ekonomi dan mendukung pembangunan jangka panjang (Azaki et al., 2023)

Lebih lanjut, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya indikasi fenomena *flypaper effect* pada belanja modal. Pengujian *flypaper effect* dilakukan dengan membandingkan tingkat respons belanja modal terhadap dana transfer pusat dan penerimaan pajak daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa DAU dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki koefisien respons yang lebih tinggi dibandingkan pajak daerah, yang mengindikasikan bahwa belanja modal daerah lebih dipengaruhi oleh alokasi transfer pusat daripada pendapatan lokal. Sebaliknya, Dana Bagi Hasil (DBH), meskipun memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal, koefisiennya lebih kecil dibanding pajak daerah sehingga tidak menunjukkan adanya *flypaper effect* yang jelas. Hal ini dapat dijelaskan oleh karakter DBH yang bersifat *revenue sharing*, di mana sebagian besar pendapatan dianggap sebagai bagian dari Pendapatan Asli

Daerah, sehingga tidak mendorong perubahan perilaku pengeluaran yang dominan. Selain itu, DBH terdiri atas DBH pajak dan DBH non-pajak dengan variasi distribusi dan besaran antarprovinsi, yang dianalisis secara agregat dalam penelitian ini, sehingga dampaknya terhadap belanja modal menjadi kurang menonjol. Dana Insentif Daerah (DID) tidak dianalisis dalam pengujian *flypaper effect* karena pengaruhnya terhadap belanja modal tidak signifikan.

Dari perspektif Teori Desentralisasi Fiskal, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme transfer dana dari pemerintah pusat memiliki peran penting dalam membentuk pola pengeluaran pemerintah daerah. DAU, yang bersifat *block grant*, memberikan fleksibilitas tinggi dalam penggunaan anggaran, namun fleksibilitas tersebut cenderung membuat dana ini lebih banyak digunakan untuk belanja rutin, sehingga dampaknya terhadap belanja modal terbatas. Sebaliknya, DAK, yang bersifat *earmarked grant* atau dana bersyarat, diarahkan secara spesifik untuk sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Karakter ini menjadikan DAK lebih mudah diterjemahkan menjadi belanja modal yang nyata, karena alokasinya sudah terikat pada tujuan tertentu dan mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional. DBH, yang berasal dari *revenue sharing*, meskipun meningkatkan total pendapatan daerah, efeknya terhadap belanja modal relatif lebih rendah karena sebagian besar dana dipersepsikan sebagai bagian dari PAD dan tidak menimbulkan perubahan signifikan dalam perilaku pengeluaran. DID, sebagai transfer berbasis kinerja, cenderung difokuskan pada peningkatan efisiensi, transparansi, dan tata kelola, sehingga kontribusinya terhadap belanja modal masih terbatas di wilayah ini.

Jika dibandingkan dengan temuan penelitian di Pulau Jawa dan Bali, seperti studi yang dilakukan oleh (Indrawan & Ayu, 2023), *flypaper effect* pada belanja modal menunjukkan pola serupa, di mana dana transfer pusat, khususnya DAU dan DAK, memiliki pengaruh dominan terhadap peningkatan belanja modal. Dalam konteks Kawasan Indonesia Timur selama periode 2018–2024, pola ini mulai terlihat serupa, menunjukkan bahwa belanja modal semakin responsif terhadap beberapa jenis transfer pusat tertentu, terutama DAU dan DAK. Kondisi ini mengindikasikan adanya penguatan peran belanja modal dalam mendukung pembangunan daerah, sekaligus memperlihatkan bahwa kombinasi antara kapasitas fiskal lokal dan mekanisme transfer fiskal pusat mulai memberikan dampak yang lebih nyata terhadap alokasi anggaran daerah.

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan pentingnya integrasi antara peningkatan kapasitas fiskal pemerintah daerah dengan pengelolaan transfer pusat yang terarah. Agar belanja modal dapat lebih efektif mendorong pembangunan infrastruktur dan layanan publik, pemerintah daerah perlu memanfaatkan pendapatan pajak dan transfer pusat secara efisien, menyesuaikan prioritas anggaran, serta memperkuat perencanaan dan pengawasan fiskal. Dengan demikian, belanja modal tidak hanya bergantung pada besaran penerimaan, tetapi juga pada kemampuan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan setiap sumber dana demi tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayahnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa belanja modal pemerintah daerah di Kawasan Indonesia Timur periode 2018–2024 cenderung bereaksi lebih kuat terhadap dana transfer pemerintah pusat dibandingkan oleh pendapatan daerah yang bersumber dari interna. Fenomena *flypaper effect* terkonfirmasi pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang ditunjukkan oleh koefisien keduanya yang lebih tinggi dibandingkan koefisien pajak daerah. Temuan empiris, ketergantungan belanja modal daerah terhadap transfer fiskal dari pemerintah pusat masih tergolong tinggi, meskipun potensi penguatan kemandirian fiskal melalui pajak daerah tetap tersedia. Sebaliknya, Dana Bagi Hasil (DBH) tidak menunjukkan *flypaper effect*, yang mencerminkan bahwa DBH dipersepsikan mendekati Pendapatan Asli Daerah dan tidak secara dominan memengaruhi perilaku belanja modal. Fenomena ini juga dipicu oleh analisis DBH yang dilakukan secara agregat tanpa pemisahan antara DBH pajak dan non-pajak, sehingga variasi pengaruh antar sumber DBH belum sepenuhnya tertangkap. Bila dibandingkan dengan hasil penelitian di Pulau Jawa dan Bali, temuan di Kawasan Indonesia Timur menunjukkan pola yang semakin mendekati wilayah maju, di mana belanja modal juga cenderung lebih responsif terhadap dana transfer tertentu, khususnya DAU. Namun demikian, ketergantungan terhadap DAK di Kawasan Indonesia Timur relatif lebih kuat, yang mencerminkan masih besarnya peran intervensi pemerintah pusat dalam mendorong penyediaan infrastruktur dan layanan dasar Secara menyeluruh, hasil analisis menegaskan urgensi peningkatan efektivitas dalam pengelolaan dana transfer lebih efisien dan produktif, disertai dengan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kapasitas pajak daerah, agar belanja modal tidak semata dipengaruhi oleh transfer pusat, tetapi turut didukung oleh kemandirian fiskal daerah.

Penelitian ini terbatas pada 12 provinsi di kawasan Indonesia Timur dan variabel fiskal tertentu, sehingga penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan wilayah dan memisahkan DBH berdasarkan sumbernya, yaitu DBH pajak dan DBH non-pajak, karena perbedaan karakteristik dan fleksibilitas penggunaannya berpotensi menimbulkan respons belanja modal yang berbeda, sehingga keberadaan *flypaper effect* pada masing-masing jenis DBH dapat terlihat atau tidak secara lebih jelas. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah sebaiknya memaksimalkan potensi pajak daerah dan membatasi pemanfaatan DAU untuk belanja rutin, serta memprioritaskan DBH dan DAK pada belanja modal fisik seperti pembangunan dan perbaikan jalan, sekolah, dan puskesmas.

REFERENSI

- Alwindi, R., & Santoso, D. B. (2017). *Analisis Kemandirian Fiskal Dan Pembangunan Ekonomi 38 Kabupaten Atau Kota di Jawa Timur (Periode 2010-2014)*.
- Arina, M. M., Koleangan, R. A. M., & Engka, D. S. M. (2019). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA MANADO. *JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN*

- KEUANGAN DAERAH*, 20(01).
<https://doi.org/10.35794/jpekd.23451.20.01.2019>
- Azaki, Naufal & Lutfi, A. (2023). Capital Grants For Local Infrastructure Provision In Perspective Of Allocative Efficiency: Evidence From Indonesia. *Journal of Public Administration Studies*, 8(2), 1–9.
<https://doi.org/10.21776/ub.jpas.2023.008.02.1>
- Badan Pemeriksaan Keuangan. (2019). *LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2019*.
- Badan Pusat Statistika. (2024). *STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI 2023 dan 2024* (Vol. 13).
- Buletin APBN, D. (2022). *Ketimpangan Antar Wilayah di Indonesia: Pembangunan Pusat Pertumbuhan Baru, Perkuat Ekonomi Wilayah (Studi Kasus Nusa Tenggara)* p.3.
- Choi, N. (2021). Analyzing Local Government Capacity and Performance: Implications for Sustainable Development. *Sustainability*, 13(7), 3862.
<https://doi.org/10.3390/su13073862>
- Fikri, R. A. (2023). *PENGARUH PAD, DAU, DBH TERHADAP BELANJA MODAL YANG DIMODERASI OLEH PERTUMBUHAN EKONOMI*. 12.
- Fitrianti, R., Zaenal, M., Fattah, S., & Hidayah, N. (2025). Flypaper effect: Analysis of financial transfers from the central government to provincial regions in Indonesia. *Public and Municipal Finance*, 14(1), 54–64.
[https://doi.org/10.21511/pmf.14\(1\).2025.05](https://doi.org/10.21511/pmf.14(1).2025.05)
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic econometrics* (5th ed). McGraw-Hill Irwin.
- Hidayat, T. (2024). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, dan Kinerja Keuangan Terhadap Belanja Modal Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 9(01), 105–115.
<https://doi.org/10.37366/akubis.v9i01.1818>
- Hines, J. R., & Thaler, R. H. (1995). Anomalies: The Flypaper Effect. *Journal of Economic Perspectives*, 9(4), 217–226. <https://doi.org/10.1257/jep.9.4.217>
- Ida Noviati Kusuma, Haryo Kuncoro Wiralaga, & Puji Yuniarti. (2025). Flypaper Effect in PAD, DAU, & DAK on the Regional Expenditure in 2019-2023. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(2), 01–17.
<https://doi.org/10.59059/jupiekes.v3i2.2182>
- Indrawan Sidhi, P. D. & Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi. (2023). PENGARUH FLYPAPER EFFECT TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA SE-BALI DAN JAWA TAHUN 2019-2021. *Vokasi : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 33–43. <https://doi.org/10.23887/vjra.v12i2.61130>
- Kuntadi, C., Pamungkas, A., Damar Fitriyanti, D., & Astri, S. (2022). PENGARUH PAJAK DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL DAERAH. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 2(3), 278–289.
<https://doi.org/10.38035/jihhp.v2i3.1040>
- Lutpikah, N. W., & Mahendra, D. (2020). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU),*

- Marni, M., Suryana, A. K. H., & Dwi Pratiwi, Y. N. (2022). PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015-2019. *EKOBIS: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 10(1), 37–48. <https://doi.org/10.36596/ekobis.v10i1.656>
- Masaki, T. (2018). The impact of intergovernmental transfers on local revenue generation in Sub-Saharan Africa: Evidence from Tanzania. *World Development*, 106, 173–186. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.01.026>
- Meutia, T., Husna, I., & Junita, A. (2022). Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi di Kota Langsa. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 12(02), 162–175. <https://doi.org/10.56196/jta.v12i02.216>
- Muhammad Farhan Muchtar, Dirvi Surya Abbas, & Sigit Budi Santoso. (2023). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, 2(1), 21–34. <https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v2i1.571>
- Mulyati, S. (2019). PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN 2013-2017. *Measurement : Jurnal Akuntansi*, 13(1), 11. <https://doi.org/10.33373/mja.v13i1.1790>
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public finance in theory and practice* (5th ed). McGraw-Hill Book Co.
- Nazwa, S. (2024). *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara*. 8.
- Novriansa, A., & Subeki, A. (n.d.). *PENGARUH DANA ALOKASI KHUSUS, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PULAU SUMATERA*.
- Nugraha, I. P. B. I. M., & Dwirandra, A. A. N. B. (2016). *KEMAMPUAN PERTUMBUHAN EKONOMI MEMODERASI PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAU DAN DBH PADA BELANJA MODAL*. 14.
- Oates, W. E. (1999). *An Essay on Fiscal Federalism*.
- Pambudi, A. S. (2023). Section Artikel Kontribusi Dana Insentif Daerah Berbasis Penghargaan Pembangunan Daerah terhadap Pembangunan Kabupaten. *Bappenas Working Papers*, 6(1), 113–140. <https://doi.org/10.47266/bwp.v6i1.174>
- Putri, W. S. (2024). *PENGARUH FLYPAPER EFFECT PAD, DAU, DAN DBH TERHADAP BELANJA DAERAH PADA PROVINSI JAWA TIMUR*. 13.
- Ramadhan, M. N., & Rahardjo, S. N. (2024). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH TERHADAP BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA DI SULAWESI*.

- Ribeiro, N., P. Nogueira, S., Linhares, M. A., & Luiz Da Silva, C. (2020). Local Governments' Efficiency: Study of its Determinants. *IBIMA Business Review*, 2020, 1–14. <https://doi.org/10.5171/2020.464307>
- Sacchi, A., & Salotti, S. (2017). The influence of decentralized taxes and intergovernmental grants on local spending volatility. *Regional Studies*, 51(4), 507–522. <https://doi.org/10.1080/00343404.2015.1111512>
- Sentari, A. N., Santoso, E., Jumiati, A., Wilantari, R. N., Viphindrartin, S., & Fatah, A. (2025). *Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Antarwilayah di Indonesia*. 3(1).
- Septiani, P. R., & Gamayuni, R. R. (2023). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Penerimaan Dana Insentif Daerah Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *Student Scientific Creativity Journal*, 1(5), 347–356. <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v1i5.2108>
- Shinta Budi Astuti, Sarah Frantiska Santoso, & Sofyan Bantasyam. (2021). PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS(DAK), DAN DANA BAGI HASIL (DBH) TERHADAP BELANJA MODAL (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Pancasila (JIAP)*, 1(2), 94–105. <https://doi.org/10.35814/jiap.v1i2.2455>
- Solicha, F. A., & Hanifa, N. (2024). Analisis FLYPAPER EFFECT Pada Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Belanja Daerah di Nusa Tenggara Timur. *INDEPENDENT : Journal Of Economics, Volume 4 Nomor 3 2024*.
- Sugiyarto, A., Lee, B. L., & Wilson, C. (2025). Narrowing the gap: Dynamics of Indonesia's public expenditure performance in economically lagging districts. *Economic Analysis and Policy*, 85, 2299–2318. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2025.03.014>
- Susilo, S., Putri, R. N. H., Simangunsong, F. Y., & Labiba, M. (2024). Intergovernmental Transfer and Local Own-Source Revenue on Capital Expenditure. *Eqien - Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13(03). <https://doi.org/10.34308/eqien.v13i03.1782>
- Waskito, W., Zuhrotun, Z., & Ruserlisyani, R. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh). *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 3(2). <https://doi.org/10.18196/rab.030247>
- Windoro, M. A., Nugroho, A. A., & Puspita, I. (2023). PENGARUH BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH KONSOLIDASIAN, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN UKURAN PASAR TERHADAP INVESTASI ASING DI INDONESIA. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan, Volume 4, Nomor 2, 2023, 142-156*.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Uji Multikolineritas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolineritas

Variabel	VIF	1/VIF
lpd	3.79	0.263977
ldau	2.63	0.379670
ldbh	3.05	0.328069
ldak	3.51	0.285050
ldid	1.22	0.821028
Mean VIF	2.84	

Sumber : Diolah Penulis (Stata 14), 2025

Lampiran 2. Uji Heterokedastisitas

Tabel 5. Hasil Uji Heterokedastistas

chi2(1)	0.54
Prob>chi2	0.4637

Sumber : Diolah Penulis (Stata 14), 2025

Lampiran 3. Uji Normalitas

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas

Variabel	Obs	W	V	Z	Prob>z
ehat	84	0.97628	1.695	1.159	0.12324

Sumber : Diolah Penulis (Stata 14), 2025

Lampiran 4. Uji T

Tabel 7. Hasil Uji T

Wald CHI2 (5)	148.21
Prob>chi2	0.000

Sumber : Diolah Penulis (Stata 14), 2025

Lampiran 5. Koefisien Determinasi

Tabel 8. Hasil Koefisien Determinasi

within	0.3036
between	0.9380
overall	0.8909

Sumber : Diolah Penulis (Stata 14), 2025